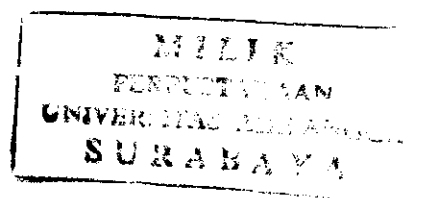


**AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN DENGAN ANGGARAN
SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN BIAYA PADA
ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
(STUDI KASUS PADA SEKRETARIAT DPRD KOTA SURABAYA)**

Adelia Dewi Maretha



ABSTRAK

DPRD merupakan lembaga yang merepresentasikan seluruh lapisan masyarakat dalam sebuah pemerintahan daerah yang pelaksanaan fungsi dan tugas pokoknya didukung dengan membentuk Sekretariat DPRD. Kewenangan yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD salah satunya adalah menentukan, menyusun, dan mengelola anggaran internal DPRD yang bersumber dari APBD. Proses penentuan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran rawan dengan adanya penyimpangan yang dapat mengakibatkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah. Untuk mencegah atau meminimalisir adanya penyimpangan, serta sejalan dengan gencarnya sorotan pertanggungjawaban pada pemerintahan daerah, akuntansi pertanggungjawaban dapat digunakan untuk memberikan informasi penting bagi pengelolaan setiap pusat pertanggungjawaban pada sebuah organisasi. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode studi kasus bertipe deskriptif terhadap penerapan elemen-elemen akuntansi pertanggungjawaban pada Sekretariat DPRD Kota Surabaya dengan anggaran sebagai elemen yang paling dominan untuk dijadikan sebagai alat pengendalian biaya. Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, rekaman arsip, wawancara, dan observasi langsung. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik penjodohan pola dan diinterpretasikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa elemen-elemen akuntansi pertanggungjawaban pada Sekretariat DPRD Kota Surabaya telah diterapkan sesuai dengan konsep dan teori yang ada, penerapannya bersamaan dengan anggaran sebagai elemen yang paling dominan dalam akuntansi pertanggungjawaban telah memadai untuk digunakan sebagai alat pengendalian biaya.

Kata Kunci: Akuntansi Pertanggungjawaban, Anggaran, Pengendalian Biaya, DPRD, Sekretariat DPRD

**RESPONSIBILITY ACCOUNTING WITH A BUDGET AS A COST
CONTROL TOOL AT PUBLIC SECTOR ORGANIZATIONS
(CASE STUDY AT THE SECRETARIAT OF THE
SURABAYA LEGISLATIVES COUNCIL)**

Adelia Dewi Maretha

ABSTRACT

The Legislatives Council or DPRD is an institution that represents all levels of society in a local government whose main functions and duties are supported by forming the Secretariat of the Legislatives Council. One of the powers possessed by the Secretariat of the Legislatives Council is to determine, compile, and manage the DPRD's internal budget, which is sourced from the APBD. The process of determining, preparing, and implementing the budget is prone to irregularities that can lead to a crisis of public trust in the DPRD as a representative institution of the local people. To prevent or minimize irregularities, and in line with the highlighted accountability in local government, responsibility accounting can be used to provide important information for the management of each responsibility center in an organization. This research is a qualitative approach using a descriptive type case study method on the application of responsibility accounting elements at the Secretariat of the Surabaya Legislatives Council with the budget as the most dominant element to be used as a cost control tool. Data collection was done by documentation, archival recordings, interviews, and direct observation. Data analysis in this research used pattern matching technique and interpreted descriptively. The results of this study indicate that the elements of responsibility accounting at the Secretariat of the Surabaya Legislatives Council have been applied in accordance with existing concepts and theories, its application together with the budget as the most dominant element in responsibility accounting is appropriate to be used as a cost control tool.

Keywords: Responsibility Accounting, Budget, Cost Control, Legislatives Council, Secretariat of the Legislative Council